



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020  
28 FEBRUARI – 3 MARET 2020**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2020**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI**  
**KE PROVINSI JAWA TENGAH**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2019-2020**  
**28 FEBRUARI – 3 MARET 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Februari 2020.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor pangan dan pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan serta menyerap aspirasi masyarakat maupun mitra kerja Komisi IV DPR RI.

### C. TUJUAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

1. Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. meninjau infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan (LPKIL) Ambarawa.
  - b. Mendengarkan penjelasan dan berdialog secara langsung dengan pengelola laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan dan *stakeholder* terkait.
2. Bidang Pangan dan Pertanian
  - a. Meninjau lahan bawang putih petani yang mendapat anggaran dari APBN maupun berasal dari importir (wajib tanam sesuai dengan RIPH).
  - b. Melakukan pertemuan dengan petani bawang putih dan importir di Kabupaten Temanggung.
  - c. Meninjau dan melakukan pertemuan dengan petani kopi di Kabupaten Temanggung.
  - d. Melakukan pertemuan dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI membahas permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Meninjau perkembangan program Pemerintah dalam melindungi dan memanfaatkan Taman Nasional Gunung Merbabu.

### D. SUSUNAN TIM

Pada Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, Komisi IV DPR RI meninjau 3 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah:

NO.	NO. AGG	NAMA	FRAKSI
1.	A-375	Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI IV/F.NASDEM
2.	A-54	DANIEL JOHAN	WAKIL KETUA KOMISI IV/ F.PKB
3.	A-220	Ir. MINDO SIANIPAR	ANGGOTA/F.PDIP

NO.	NO. AGG	NAMA	FRAKSI
4.	A-174	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
5.	A-243	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP.	ANGGOTA/F.PDIP
6.	A-193	VITA ERVINA, S.E.	ANGGOTA/F.PDIP
7.	A-303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	ANGGOTA/F.PG
8.	A-292	Ir. ICHSAN FIRDAUS	ANGGOTA/F.PG
9.	A-306	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	ANGGOTA/F.PG
10.	A-290	BUDHY SETIAWAN	ANGGOTA/F.PG
11.	A-101	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.	ANGGOTA/F.GERINDRA
12.	A-84	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.	ANGGOTA/F.GERINDRA
13.	A-403	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.	ANGGOTA/F.NASDEM
14.	A-406	H. SULAEMAN L. HAMZAH	ANGGOTA/F.NASDEM
15.	A-43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	ANGGOTA/F.PKB
16.	A-20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A .	ANGGOTA/F.PKB
17.	A-574	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.	ANGGOTA/F.PD
18.	A-556	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	ANGGOTA/F.PD
19.	A-567	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.	ANGGOTA/F.PD
20.	A-457	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.	ANGGOTA/F.PKS
21.	A-441	Drs. H. HAMID NOOR YASIN, M.M.	ANGGOTA/F.PKS
22.	A-502	HAERUDIN, S.Ag., M.H.	ANGGOTA /F.PAN
23.	A-471	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	ANGGOTA/F.PPP

## E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 3 Maret 2020.

## F. PENJELASAN DAN BAHAN PAPARAN MITRA KERJA

### 1. Balai Pembenihan dan Budi Daya Ikan Air Tawar, Ambarawa

- a. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Ambarawa merupakan salah satu unit dari 4 LPKIL dari 3 Loka di bawah koordinasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

- b. Lokasi LPKIL tepatnya di Kota Ambarawa dengan memiliki luas lahan 9.150 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 6.000 m<sup>2</sup> kolam dan 3.150 m<sup>2</sup> bangunan.
- c. Sumber air yang digunakan berasal dari aliran sungai panjang dan sumur.
- d. Ikan-ikan yang dipijahkan di LPKIL Ambarawa, antara lain ikan Nila gift (*oreochromis* sp.), ikan Karper (*cyprinus carprio*), dan ikan Koi (*cyprinus carprio*).
- e. Kegiatan laboratorium pengujian, antara lain untuk pengukuran kualitas air dan identifikasi penyakit ikan.



Alat Laboratorium

- f. Visinya menjadi lembaga pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya.
- g. Misinya meningkatkan taraf hidup dengan peningkatan pelayanan yang berhasil guna, tepat guna, dan tepat sasaran.
- h. Motonya menghasilkan benih unggul dan petani makmur.
- i. Tugas Pokok dan Fungsi dari LPKIL
  - 1) Melaksanakan penyediaan benih dan calon induk ikan yang bermutu.
  - 2) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan.
  - 3) Melaksanakan teknologi perbenihan dan budi daya ikan yang baik dan ramah lingkungan.
  - 4) Melaksanakan penebaran benih di perairan umum.
  - 5) Melaksanakan tugas administrasi dan ketatausahaan.
  - 6) Melaksanakan pembinaan teknis perbenihan dan budi daya ikan kepada siswa, mahasiswa, pembudi daya ikan, dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

- 7) Tempat untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan (*Training Center*).
- 8) Merupakan pusat informasi dan referensi perbenihan dan budi daya ikan air tawar



Kolam Induk



Bak Fiber Penetasan

j. Pemijahan Ikan (Karper dan Nila *Gift*)

Menggunakan sistem alami dimana dilakukan dengan cara memilih induk yang telah diberok dengan perbandingan jantan : betina (3:1), kemudian diletakkan pada jaring hapa yang berisi eceng gondok. Setelah 1 malam, telur yang menempel pada akar eceng gondok dipindahkan ke kolam benih.

k. Pemijahan ikan Nila *Gift*

Dilakukan dengan cara memberok induk dengan perbandingan jantan : betina (3:1). Ikan Nila jantan diletakkan pada jaring hapa dan betina di letakkan di kolam secara langsung. Setelah 10-14 hari, ikan Nila jantan dilepaskan ke dalam kolam. Kemudian benih ikan nila diambil dengan menggunakan jaring atau seser kemudian dipindahkan ke kolam benih.



Panen dan Penjualan Benih Ikan Nila



Distribusi Bibit Ikan Nila ke Rawapening



Pemijahan Koi dengan media eceng gondok

l. Produksi Benih

- a. Tahun 2017: benih Nila sebanyak 1.770.330 ekor, benih Koi sebanyak 23.604 ekor, dan Karper sebanyak 25.456 ekor.
- b. Tahun 2018 benih Nila sebanyak 1.798.395 ekor, Koi sebanyak 23.979 ekor, dan Karper sebanyak 29.973 ekor.

- c. Tahun 2019 benih Nila sebanyak 914.625 ekor, Koi sebanyak 12.195 ekor, dan karper sebanyak 15.244 ekor



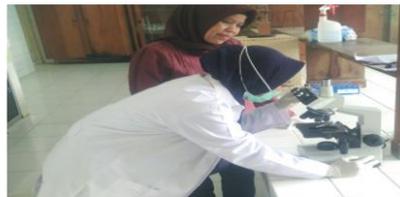
Sapuh benih ikan nila



Pemberian pakan



Pengukuran kualitas air



Pengamatan penyakit ikan

## 2. Pertanian Bawang Putih dan Kopi, Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris yang sangat subur, topografi berbukit yang diapit Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dengan agroklimat yang sangat mendukung untuk dikembangkan komoditas pertanian unggul (hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan) yang mempunyai daya saing pasar.

Penduduk Temanggung berjumlah 805.253 jiwa, 61% bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung tidak hanya terkait dengan kondisi petani, namun juga terkait dengan kelembagaan petani, sistem penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan, serta teknologi inovasi dalam sistem agribisnis.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi dan memberdayakan kelembagaan petani agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi pasar.

Program yang dilaksanakan:

- a. Penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PERDA LP2B).

Luasan LP2B adalah 20.709 ha yang disusun sesuai RTRW dan disusun dengan *one team, one map, dan one policy* bersama BPN dan BPS.

- b. Kegiatan tani pekarangan

Kegiatan ini berfokus pada ketersediaan pangan di rumah tangga dengan memberdayakan peran ibu melalui KWT (kelompok wanita tani) dengan menyediakan pangan beragam bergizi seimbang dan aman secara mandiri dari hasil pekarangan.

- c. Pasar tani pekarangan

Kegiatan ini merupakan fasilitas pemasaran kelebihan produk hasil tani pekarangan beserta derivasi dan inovasinya, seperti aneka buah dan sayur pekarangan, tanaman hias, ternak pekarangan, serta aneka olah pangan lokal.

- d. Pengembangan bawang putih

- 1) Tahun 2013: pengembangan kawasan bawang putih seluas 5 ha melalui dana APBD Provinsi di Desa Kruisan Kecamatan Kledung.

- 2) Tahun 2014: Pengembangan kawasan bawang putih seluas 25 ha dan memberikan bantuan benih dan saprodi melalui anggaran APBN di Kecamatan Kledung (Desa Petarangan dan Kruisan) dan Kec. Bulu serta bantuan APBD Provinsi seluas 5 ha di Desa Wates Kec. Wonobojo.

- 3) Tahun 2015: Pengembangan kawasan bawang putih seluas 20 ha melalui dana APBN tersebar di sentra-sentra produksi di Kec. Ngadirejo, Tembarak, Bulu, dan Candiroto.

- 4) Tahun 2016: Pengembangan kawasan bawang putih seluas 254 ha dan 50 ha (CF-SKR) APBN di 5 kecamatan sentra produksi: Kecamatan Kledung, Parakan, Bulu, Candiroto, dan Tretep.

- 5) Tahun 2017 (APBN Reguler): Pengembangan kawasan bawang putih seluas 50 ha (anggaran APBN) di Kecamatan Parakan, Bulu, Ngadirejo, dan Tretep (4 kecamatan, 10 kelompok).

- 6) Tahun 2017 (APBNP): Pengembangan kawasan bawang putih seluas 1.120 ha APBN di Kecamatan Tretep, Parakan, Wonoboyo, Tlogomulyo, Ngadirejo, Candiroto, Bulu, Tembarak, Bansari, Selopampang, dan Kledung (11 kecamatan, 152 kelompok).
- 7) Tahun 2018 (APBN): Pengembangan kawasan bawang putih seluas 1.930 ha (anggaran APBN) di Kecamatan Tretep, Parakan, Wonoboyo, Tlogomulyo, Ngadirejo, Candiroto, Bulu, Tembarak, Bansari, Selopampang, dan Kledung (17 kecamatan, 293 kelompok).
- 8) Tahun 2019 melalui APBN seluas 690 ha, di Kecamatan Tretep, Parakan, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Bulu, Tembarak, Bansari, Selopampang, Kaloran, dan Kledung.
- 9) Mulai tahun 2017 sampai sekarang importir bawang putih telah melaksanakan wajib tanam di Temanggung kurang lebih sebanyak 35 importir.
- 10) Tahun 2019 importir (17 importir) menanam seluas 679,54 ha di Kecamatan Tretep, Candiroto, Wonoboyo, Tembarak, Kledung, Bulu, Ngadirejo, Bansari, dan Parakan.
- 11) Luas panen bawang putih dan produksi di Kabupaten Temanggung antara lain:

Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
2014	298	1.973,10
2015	846	5.784
2016	530	3.608
2017	640	4.710
2018	1.748	13.803
2019	3.044	24.108,48
2020	2.800	22.176

- 12) Bawang putih Temanggung memiliki ciri khas aroma yang lebih tajam (varietas lokal yaitu lumbu hijau dan lumbu kuning). Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan benih lokal dan regional, Kabupaten Temanggung juga telah memiliki 26 penangkar benih bawang putih.

- e. Kartu Tani. Penyerapan kartu tani Temanggung tertinggi se-Indonesia, yaitu  $\pm 60\%$ .
- f. Pengembangan komoditas tembakau dilakukan dengan melaksanakan pemurnian dan pemuliaan tembakau Temanggung; melaksanakan kerja sama dengan BALITTAS Malang hingga menghasilkan varietas unggul nasional tembakau, yaitu Kemloko 1, Kemloko 2, Kemloko 3, Kemloko 4, Kemloko 5, dan 6 Agribun; pembinaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) tembakau Srinthil Temanggung sebagai produk tembakau dengan kualitas tertinggi; melaksanakan kegiatan wiwit tembakau dengan ribuan tumpeng; pendampingan petani dalam budi daya dan pascapanen untuk memproduksi tembakau berkualitas; mengupayakan perbaikan tata niaga tembakau melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembentukan gugus tugas tembakau; mendorong pelaksanaan Permentan Nomor 23 Tahun 2019, terkait dengan kemitraan dan pembelian tembakau petani, serta ketentuan impor tembakau.
- g. Pengembangan komoditas vanili. Luas lahan vanili di Temanggung saat ini berkisar antara 30-35an ha yang terdiri atas lahan petani tradisional dan investor pengembang. Temanggung telah memiliki  $\pm 10$  penangkar benih diantaranya Desa Sucen, Gemawang, Kramat, Kranggan, Krempong, Mandang, Gandurejo-Bulu, Kedu, dan Temanggung.
- h. Pengembangan komoditas kopi  
Luasan lahan komoditas kopi 1.739 ha dengan produksi sebesar 1.478,83 ton untuk kopi arabika dan 13.678 ha dengan produksi 11.216,65 ton untuk kopi robusta, dan Temanggung menjadi produsen kopi utama di Jawa Tengah.
- i. KUR (Kredit Usaha Rakyat)  
Bank yang membuka KUR di Temanggung diantaranya:  
**Bank Rakyat Indonesia (BRI)**  
Sektor usaha yang dibiayai: pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa, dan perdagangan. Serapan KUR untuk komoditas pertanian dari BRI sebesar Rp329.501.538.462,00.

### **Bank Negara Indonesia (BNI)**

Suku bunga KUR BNI pada tahun 2020 sebesar 6% efektif per tahun. Sektor ekonomi KUR BNI, antara lain pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa. Serapan KUR untuk komoditas pertanian dari BNI adalah Rp8.400.000.000,00.

j. **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Di Kabupaten Temanggung program KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dilakukan oleh Perum Bulog. Wilayah kerja Perum Bulog kantor cabang Kedu dengan lokasi gudang di Bengkal Temanggung. Penjualan beras melalui program sembako khusus untuk Kabupaten Temanggung untuk alokasi Januari 2020 telah selesai disalurkan dengan kuantum sebesar 406.400 kg, adapun untuk alokasi Januari penyaluran masih secara curah (kemasan 25 kg). Untuk alokasi Februari baru didistribusikan dengan kemasan 10 kg (penerimaan per KPM mulai Januari 10 kg beras/KPM), sampai dengan saat ini PO yang masuk sebesar 403.770 kg. Adapun harga penjualan beras untuk program sembako di Temanggung Rp10.000,00 kepada E-Waroeng.

### **3. BUMN Klaster Pangan**

BUMN Klaster Pangan terdiri dari PT RNI, PT SHS, PT Pertani, PT Perinus, Perum Perindo, PT Berdikari, PT Garam, PT PPI, dan BGR *Logistics*.

<b>No</b>	<b>Masalah yang Dihadapi</b>	<b>Dukungan yang Diharapkan</b>
1	Cakupan area benih bantuan pemerintah tidak sampai ke pelosok daerah (daerah Remote).	✓ Mendorong pemerintah untuk mengkaji harga benih dan biaya distribusi. ✓ Mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali program subsidi benih pertanian.
2	Arah kebijakan pemerintah dalam benih padi in hibrida belum tegas.	Mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih tegas perihal perbenihan padi in hibrida apakah diserahkan kepada kelompok tani (Desa Mandiri Benih, Korporasi Perbenihan Padi) atau Industri.

No	Masalah yang Dihadapi	Dukungan yang Diharapkan
3	Berkurangnya areal perkebunan tebu.	<p>Dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan minat petani untuk menanam tebu melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subsidi/insentif sewa lahan, penyediaan bibit, dan biaya pengolahan.</li> <li>✓ Akses pendanaan yang lebih mudah (penyederhanaan pengajuan KUR).</li> </ul>
4	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 dimana komoditas garam dihapus dari daftar barang kebutuhan pokok lainnya.	Memasukkan kembali produk garam sebagai bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya agar pemerintah dapat menetapkan harga dasar garam. Menghindari merosotnya harga garam rakyat.
5	PT Perinus dan Perum Perindo menghadapi masalah yang sama yaitu: Pendangkalan akibat sedimentasi di alur perairan menuju pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum di Pantai Utara Jawa Tengah, khususnya wilayah Tegal dan Pekalongan yang menghambat aktivitas olah gerak kapal.	Perhatian Badan Otorita Pelabuhan, operator pelabuhan, dan lembaga terkait pengelolaan perairan untuk melakukan normalisasi atau pengerukan secara berkala.
6	Adanya ROB pada sebagian besar lahan di areal pantai utara Jawa Tengah.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar membuat kebijakan penanggulangan ROB.

No	Masalah yang Dihadapi	Dukungan yang Diharapkan
7	Sarana dan prasarana yang relatif sudah tua, dibangun pada tahun 1980.	Perlunya revitalisasi aset yang sudah memiliki usia melebihi umur teknis (sudah lebih dari 30 tahun).

#### 4. PTPN IX

Bisnis Usaha:

- a. Memiliki pabrik karet yang terdiri dari 15 pabrik *Ribbed Smoke Sheet* (RSS), 1 *Thin Pale Crepe* (TPC), 5 *Brown Crepe* (BrCr) dan 1 Lateks Pekat.

Total kapasitas pabrik karet sebesar 156 ton/hari.

Rata-rata produksi per tahun  $\pm$  26.695 ton.

Total area karet  $\pm$  21.867 ha.

- b. Memiliki 3 unit pabrik teh dengan total kapasitas 12,1 ton/hari

Produksi pertahun  $\pm$  1.975 ton.

Total areal teh  $\pm$  1.164,78 ha.

- c. PTPN IX memiliki 2 pabrik kopi dengan total kapasitas 35,6 ton/hari.

Rata-rata produksi pertahun  $\pm$  843 ton.

Total areal kopi  $\pm$  951,45 ha.

- d. PTPN IX memiliki 8 pabrik gula yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

Total kapasitas giling sebanyak 13.450 TCD.

4 pabrik gula beku yang beroperasi di PG Ceper, PG Comal, PG Colomadu, dan PG Banjaratma, sedangkan 1 PG Cepiring dikerjasamakan dengan kepemilikan saham 14,46%.

- e. Areal serai seluas 82,63 ha (*monoculture*), 156,64 (*intercrop*) pabrik penyulingan tersebar di 13 kebun.

- f. Kayu ditanam di areal monokultur (4.393 ha) dan *intercrop* (1.461 ha)

- g. Hasil kerja sama dengan Perum Perindo seluas 10 ha, kolam budi daya udang yang akan dikembangkan secara mandiri seluas 10 ha.

- h. Wisata agro di Kaligua, Kampoeng Kopi Banaran, Sentral Park, Jollong, Sri Gunung, Gondang Winangun, Sondokoro, Puncak Tombo, Waduk Koebangkungkung, Bessaran Hijau, Loco Antik, Comal Baru.

- i. Banaran. Kampoeng kopi Banaran, Banaran Mugas, Banaran Warnasari, Banaran Krumpt, Banaran Rest Area 360,260, Banaran Kudus, Banaran Colomadu, Banaran *Coffee & Art*, Banaran Transmart, Banaran Bandara Solo, Banaran Ronggowarsito (Cangkir Gendhis).

Rencana Optimalisasi Aset 2020 PTPN IX:

- a. Pengembangan Solar Farm.
- b. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.
- c. Pengembangan Rest Area KM 456.
- d. Pengembangan Wisata Agro Jollong.
- e. Aset Kota Lama Gudang Garuda.
- f. Aset Kota Lama Mpu Tantular No. 33.
- g. Pengembangan budi daya udang vannamei.
- h. Pengembangan Wisata Agro Waduk Gondang.

PTPN IX mendapatkan PMN dengan total nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Tahun Anggaran 2015) yang diperuntukkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, mendukung industri gula nasional, dan kedaulatan pangan.

### **Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan berupa Okupasi Lahan PTPN IX Tahun 2020**

#### **a. Kebun Kawung (*Afdeling* Panenjoan, 35 Ha)**

Permasalahan:

Okupasi lahan mengatasnamakan masyarakat Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap yang dimotori oleh Organisasi Serikat Tani Mandiri dengan Majelis Pertimbangan Organisasi Sdr. Sugeng terhadap Tanah HGU milik PTPN IX Kebun Kawung/Meluwung *Afdeling* Panenjoan serta LSM STAM (Serikat Tani Mandiri) dan Kelompok Tani "Cinta Tani" yang mendirikan posko untuk melakukan pertemuan sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan pihak PTPN IX Kebun Kawung dan pembuatan sawah oleh masyarakat ketika musim kemarau (lokasi tersebut digunakan oleh PTPN IX Kebun Kawung/Meluwung sebagai resapan air).

Kondisi saat ini:

Telah dilakukan upaya pengamanan aset perusahaan berupa lahan HGU dimaksud, dengan melaksanakan Apel Siaga Federasi Serikat Pekerja Perkebunan IX TT (FSPBUN IX TT) dengan dilanjutkan kegiatan lapangan pengamanan asset pada lokasi dimaksud dan melakukan penanaman kembali pohon karet, sehingga sampai dengan saat ini secara fisik masih dalam penguasaan/pengelolaan PTPN IX dan secara yuridis masih Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IX.

**b. Kebun Batujamus (*Afdeling* Kepoh/Sambirejo, Kabupaten Sragen, 180,64 Ha)**

Permasalahan:

Okupasi lahan oleh masyarakat Desa Sambirejo, bermula dengan adanya SK Redistribusi Tanah oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Tengah (KINAG) pada tahun 1964 sebesar 47 bidang, dimana satu bidang tanah atas nama Wagimin berada di dalam lahan HGU PTPN IX, sehingga Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) memotori pergerakan masyarakat untuk melakukan okupasi lahan.

Kondisi saat ini:

Telah dilakukan upaya pengamanan aset perusahaan, sehingga walaupun secara fisik dalam penguasaan/pengelolaan oleh masyarakat (FPKKS) namun secara yuridis masih eks HGU PTPN IX dan berangsur-angsur masyarakat telah menyadari bahwa lahan yang mereka kuasai adalah lahan HGU milik PTPN IX.

**c. Kebun Merbuh (*Afdeling* Kepoh/Sambirejo, Kabupaten Sragen, 180,64 Ha)**

Permasalahan:

Okupasi lahan oleh masyarakat Desa Kaliputih dan Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal yang dimotori oleh Sdr. Rokhis dkk. menyatakan bahwa tanah yang digarap oleh mereka merupakan tanah warisan dari nenek moyang dan diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin pemakaian tanah pengairan, namun dari

kenginan menggarap lahan meningkat menjadi berkeinginan untuk memiliki lahan.

Kondisi saat ini:

Telah dilakukan upaya pengamanan aset melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah dan Bakir cs. (masyarakat penjarah tanah) melalui Pengadilan Negeri Kendal yang dimenangkan oleh PTPN IX (Persero) yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, namun ditingkat Mahkamah Agung RI amar putusan kasasi perkara perdata Gugatan nomor: 1743 K/Pdt/2004 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Tinggi Semarang serta mengadili bahwa gugatan penggugat (PTPN IX) tidak dapat diterima (NO = *Neit Ontvankelijk Verklaard*), dikarenakan adanya kesalahan pengajuan gugatan yang seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal dan masyarakat penggarap menafsirkan bahwa mereka dalam posisi yang diuntungkan sehingga sampai dengan saat ini masyarakat penggarap masih menguasai dan mengelola lahan, walaupun ada sebagian yang dengan kesadarannya mengembalikan dan mengakui bahwasannya lahan dimaksud adalah lahan HGU PTPN IX (asset BUMN).

**d. Kebun Getas (Kabupaten Semarang, 274,96 Ha)**

Permasalahan:

Penguasaan lahan oleh masyarakat Desa Bringin dan Tanjung (Kelompok Padepokan Tringgani) yang dimotori oleh Sdr. YB. Sanyoto terhadap tanah di Kebun Getas yang digunakan untuk pemukiman dan telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang

Kondisi saat ini:

Sebagai upaya pengamanan aset, berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten Semarang selaku Tergugat I dan III dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran sampai dengan terbitnya putusan pengadilan ungaran (Putusan Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2013/PN.Ung. dengan hasil putusan Gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah *inkracht*, namun PTPN IX belum melakukan eksekusi lahan dan saat ini secara fisik masih dikuasai oleh masyarakat walaupun secara yuridis masih HGU PTPN IX.

## **5. Perum Bulog**

- a. Stok gabah/beras di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini:
  - 1) Gabah: PSO senilai 337 ton dan komersil senilai 7 ton.
  - 2) Beras: PSO senilai 107.162,51 ton dan komersil senilai 7.377,28 ton.
- b. Total kapasitas gudang Perum Bulog di Provinsi Jawa Tengah sebesar 309.500 ton dan sisa ruang yang bisa digunakan untuk menyerap gabah petani di musim panen selanjutnya adalah 115.528 ton.
- c. Tahun 2020, Perum Bulog menargetkan untuk realisasi pengadaan beras/gabah di Provinsi Jawa Tengah senilai 185.000 ton.
- d. Perum Bulog Provinsi Jawa Tengah juga telah mengadakan pangan pokok lainnya, diantaranya: daging ayam sebesar 58.979 kg, telur ayam sebesar 75.610 kg, gula kristal sebesar 11.132 kg, kacang tanah sebesar 1.950 kg, kacang hijau sebesar 40.695 kg, dan sayur/buah sebesar 67.437 kg.
- e. Total realisasi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 34.400 ton.
- f. Pengembangan jaringan RPK (Rumah Pangan Kita) bersama dengan masyarakat telah mencapai 12.573 RPK dan aktif yang aktif sebesar 7.035 RPK.

## **6. Taman Nasional Gunung Merbabu**

- a. Luas kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sebesar 5.820,49 ha
- b. Sesuai dengan SK Nomor SK.135/MenhutII/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas  $\pm$  5.725 ha.
- c. Fungsi Taman Wisata Gunung Merbabu adalah sebagai:
  - 1) sumber mata air. Debit air 219 liter/detik dan digunakan oleh 2.075 KK.

- 2) habitat flora dan fauna yang dilindungi (3 jenis primata, 25 jenis kupu-kupu, 60 jenis tumbuhan obat, 57 jenis tumbuhan hias, 113 jenis aves, dan 13 jenis mamalia.
  - 3) memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menarik.
  - 4) berkah perumputan (lacen)/perencekan. Setiap hari masyarakat sekitar mengambil rumput dari kawasan dengan intensitas 1-2 kali/hari.
- d. Taman Nasional Gunung Merbabu menyumbang penerimaan negara Tahun 2019 sebesar Rp2,35 miliar yang terdiri dari wisatawan nusantara sebesar 318.288 orang dan mancanegara sebesar 479 orang.
- e. Di Taman Nasional Gunung Merbabu terdapat permasalahan dalam pemanfaatan air (Umbul Songo di wilayah Kopeng),
- 1) Terdapat 9 sumber mata air dengan debit keseluruhan sebesar 33,29 l/dtk.
  - 2) Dimanfaatkan oleh tiga desa yaitu Kopeng, Samirono, dan Batur ( $\pm$  600-700 KK).
  - 3) Terdapat monopoli pemakaian air oleh pihak tertentu sehingga semrawut, tidak ada yang mengelola.
  - 4) Sering terjadi konflik pemanfaatan air di masyarakat.
- f. Pemerintah telah melakukan penataan pemanfaatan air dengan perbaikan di beberapa tempat.
- 1) Dibangun bak penampungan di dekat sumber mata air berukuran 2 m x 3 m x 4 m.
  - 2) Air ditampung dalam bak penampungan kemudian dialirkan ke masyarakat melalui jaringan pipa.
  - 3) Hanya terdapat 3 pipa outlet dari bak penampungan yaitu ke desa berukuran 3,5 inchi sebanyak 2 outlet, pipa 1,5 inchi ke lokasi wisata Umbul Songo.
  - 4) Diterbitkan ijin pemanfaatan air (IPA) kepada kelompok Tirta Umbul Rejo dengan SK Kepala Balai TNGMb No. SK. 221/T.3/TU/MANF/09/2019 tanggal 4 September 2019.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### A. PENINJAUAN DI BALAI PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR-LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN AMBARAWA (LPKIL).

Aspirasi/masukan:

1. Kualitas dan kuantitas air masih kurang untuk kebutuhan kolam, karena belum memiliki tandon air untuk sumber air artesis sebagai cadangan air saat musim kemarau.
2. Perlu rehabilitasi sarana, antara lain: batas tepi pada beberapa kolam *outdoor* terkikis, akses jalan, belum tersedia bak penampungan sampah, jaring hapa, dan beberapa alat yang rusak.
3. Perlu peremajaan prasarana, antara lain: lampu penerangan jalan, mebelair untuk kegiatan magang, dan alat perkantoran.

### B. PERTEMUAN DAN PENJELASAN DARI PETANI TEMBAKAU, BUPATI TEMANGGUNG, DAN WAKIL RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Penjelasan:

1. Potensi Kabupaten Temanggung sangat besar untuk dibudidayakan dan saat ini sudah ada penanaman tembakau, bawang putih (25% kebutuhan nasional berasal dari Temanggung), kopi, sapi perah, dll.
2. Potensi kopi sangat besar namun belum ada sertifikasi yang mengakibatkan kopi Temanggung tidak bisa diekspor.
3. 70% penduduk Temanggung bermatapencaharian petani dan sebagian besar merupakan petani tembakau (70%).
4. Kabupaten Temanggung menjadi sentra pembibitan dan produksi bawang putih dalam rangka meminimalisir impor bawang putih dari China.
5. Terdapat 12 ribu -13 ribu ha lahan bawang putih yang ada di Kabupaten Temanggung dan lahan tersebut merupakan lahan substitusi dari lahan tembakau.
6. Kabupaten Temanggung dapat menghasilkan  $\pm$  3,5-4 triliun rupiah dari produksi tembakau.

7. Kabupaten Temanggung juga memiliki lahan kopi Arabika seluas 8000 ha dan kopi Robusta seluas 11.000 ha. Kopi Arabika Kabupaten Temanggung tumbuh di Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung lainnya.
8. Kopi *Java Arabica* adalah kopi dari Kabupaten Temanggung.

Aspirasi/masukan:

1. Meminta dukungan kepada Kementerian Pertanian untuk lebih memperhatikan komoditas bawang putih dan cabe di wilayah Kabupaten Temanggung.
2. Terkait dengan dana bagi hasil (DBH) dari cukai hasil tembakau (CHT) yang dibagikan ke daerah sebesar 2%. Petani meminta agar dinaikkan menjadi 5% karena dana tersebut tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tembakau.
3. APBN bantuan yang diberikan totalnya tidak lebih dari Rp1,7 miliar. Nilai tersebut tidak mencukupi sehingga petani berharap tahun depan anggaran pertembakauan di Kementerian Pertanian dapat ditingkatkan.
4. Importasi tembakau yang dimulai tahun 2010, rata-rata 125 ribu ton/tahun yang berasal dari China, Brazil, dll. Petani menyikapi importasi tersebut diatas ambang batas kewajaran (lebih dari 50%). Petani berharap Komisi IV DPR RI dapat memfasilitasi dengan Menteri Pertanian agar Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau dan Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dapat melindungi sistem pertembakauan nasional.
5. Harapannya Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau dan Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dapat segera dijalankan dan pembatasan importasi tembakau dapat menumbuhkembangkan investasi pertanian tembakau nasional.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengkaji wilayah Kabupaten Temanggung sebagai wilayah budi daya sapi perah.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Temanggung.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menghentikan impor tembakau demi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

### C. PERTEMUAN DENGAN PETANI BAWANG PUTIH DI TEMANGGUNG

Penjelasan:

1. Kabupaten Temanggung dalam 4 tahun terakhir konsisten memproduksi bawang putih di lahan 2000-3000 ha yang dibagi menjadi 3 program (program swadaya, importir, dan APBN).
2. Potensi tanam bawang putih dapat menggunakan lahan tembakau karena bawang putih merupakan tanaman subtropis yang membutuhkan kelembapan tinggi dan suhu yang kecil (dingin).
3. Kabupaten Temanggung masih memiliki 1/4 lahan (12 ribu ha) yang potensial ditanami komoditas bawang putih.

Aspirasi/masukan:

1. Kabupaten Temanggung dapat menghasilkan bibit bawang putih yang umumnya digunakan sendiri maupun diekspor ke wilayah lainnya. **Hambatannya**, bawang putih tidak bisa ditanam di 2 musim dikarenakan air yang masih terbatas sehingga membutuhkan alat *springkle*, pompa air, perpipaan, dll. Selain itu, juga terdapat permasalahan pupuk.
2. **Harapannya**: pupuk bersubsidi untuk petani bawang putih dan tembakau tidak dikurangi dan ditambah subsidiya. Disamping itu, petani juga meminta dukungan pupuk organik.
3. Membutuhkan teknologi yang baru untuk meningkatkan produksi bawang putih. Disamping itu, masyarakat umumnya sering mengeluhkan bawang putih Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan bawang putih impor.

Tanggapan Pemerintah:

1. Pemerintah kemungkinan akan menaikkan anggaran pupuk bersubsidi.
2. Keterbatasan pupuk dapat menebus ke PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (PIHC) yang diaudit BPK dan jika kelebihan dalam penyaluran maka akan dihitung dalam kurang bayar Pemerintah ke PIHC.
3. Pemerintah akan memberikan dukungan pipanisasi, embung, dan bibit guna mendukung peningkatan produktivitas bawang putih.

Tanggapan dari Importir (*Food Station*):

1. Importir memberikan saprodi (Rp15 juta), bibit (15 kg) termasuk sulam, dan pendampingan dari awal menanam hingga panen.
2. Pengajuan impor sekitar 20 ribu ton disetujui sekitar 15 ribu ton yang ditanam 150 ha dan panen sekitar 4-6 ton/ha (basah).

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar menghentikan importasi bawang putih.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan bantuan bibit unggul, pupuk subsidi untuk petani bawang putih.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan kartu tani agar pupuk bersubsidi dapat dirasakan oleh seluruh petani sesuai dengan e-RDCK-nya.
4. Komisi IV DPR RI meminta petani untuk mengkombinasikan penggunaan pupuk organik dan anorganik yang bisa meningkatkan produktivitas bawang putih.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah memberikan dukungan pompanisasi dan pompanisasi agar permasalahan problem air dapat diatasi.

#### **D. PERTEMUAN DENGAN PETANI KOPI DI TEMANGGUNG**

Penjelasan:

1. Pertanian kopi di Kabupaten Temanggung dikembangkan sistem konservasi yang fungsinya adalah mengurangi erosi (kemiringan tanah 60%).
2. Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung ditanam di luasan 12 ribu ha dan Arabika di luasan 2800 ha.
3. Kabupaten Temanggung memiliki 328 brand kopi Arabika.

Aspirasi/masukan:

Petani kopi di Kabupaten Temanggung membutuhkan bantuan pupuk organik cair.

## E. PERTEMUAN DENGAN SELURUH STAKEHOLDER DI POSONG TEMANGGUNG

Penjelasan:

1. Pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Temanggung sudah menggunakan dan kuota pupuk dapat digunakan selama 1 tahun dan Kabupaten Temanggung paling banyak menggunakan kartu tani nasional. Seluruh petani menebus pupuk dengan kartu tani.
2. Ada kios yang meminta tambahan Rp500,00 untuk pengambilan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani.

Aspirasi/masukan:

1. mengusulkan teknologi perbaikan mutu dan genetik untuk bawang putih local.
2. komoditas kopi membutuhkan subsidi pupuk organik cair.
3. membutuhkan alat mutu untuk komoditas kopi (pengukuran kadar air).
4. meminta Pemerintah mempertahankan harga bawang putih lokal agar tidak anjlok.
5. Petani bawang putih Kabupaten Temanggung membutuhkan alat *springkle* yang terhubung dengan sumber air.
6. Terasering di daerah Posong Temanggung masih belum maksimal sehingga membutuhkan bantuan bibit kopi Arabika. Tanaman kopi merupakan tanaman konservasi di Kabupaten Temanggung.
7. meminta agar pemberian bantuan bibit kopi atau tanaman yang lainnya yang mampu mengkonservasi lahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah diberikan secara maksimal (penyelamatan lingkungan dengan penanaman tanaman semusim dan tanaman tahunan).
8. Terkait dengan penyelamatan lingkungan (konservasi) diharapkan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan tidak hanya bibit, namun juga perawatan pascapanen juga dipenuhi.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki lahan di bawah 2 ha.
2. Sudah ada jaminan dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian bahwa tidak akan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Litbang Kementerian Pertanian untuk mengkaji mutu genetik komoditas pertanian yang kemudian disosialisasikan melalui pelatihan kepada petani.
4. Komisi IV DPR RI memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk bulan depan.
5. Akan ada sinkronisasi anggaran untuk Kabupaten Temanggung yang mampu memenuhi kebutuhan 25% bawang putih nasional. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk menghentikan impor bawang putih.
6. Komisi IV DPR RI mengundang Bupati Kabupaten Temanggung dan Dinas Pertanian untuk bertemu langsung dengan Dirjen Kementerian Pertanian di DPR RI.

## **F. PERTEMUAN DENGAN BUMN KLASTER PANGAN, PTPN IX, PERUM BULOG, PIHC, TIM TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU, DAN BIBUNGAN DI KANTOR PTPN IX SEMARANG**

### **1. PTPN IX**

Penjelasan:

- a. Agrowisata yang dimiliki PTPN IX menyumbang 10% pendapatan bagi PTPN IX.
- b. Kapasitas Pabrik yang dimiliki oleh PTPN IX hanya mampu mengolah 60% dari 13 ribu ton/hari atau 60 ribu ton/tahun (selama 4 tahun terakhir).
- c. PTPN IX dalam memproduksi gula, bermitra dengan petani (66%).

Aspirasi:

- a. PTPN IX terkendala dengan permasalahan lahan (tanaman tebu) yang marak alih fungsi lahan.
- b. HET gula (sesuai Peraturan Mendag Rp12.500,00/kg) di pasar modern cukup memprihatinkan. Menjaga HET gula agar tetap stabil di Rp12.500,00/kg merupakan tantangan yang berat bagi PTPN IX.
- c. Terkait dengan kondisi keuangan PTPN *Group* yang masih krisis.

### **2. BUMN Klaster Pangan**

- a. Perubahan nomenklatur yang menjadikan BUMN terkait dengan pangan menjadi satu menjadi BUMN Klaster Pangan.

- b. Diperkirakan pada akhir bulan Maret *business plan* BUMN Klaster Pangan dapat selesai.
- c. Isu-isu BUMN Klaster Pangan saat ini memiliki kondisi keuangan yang sangat tidak baik (3 Anggota BUMN Klaster Pangan yang sehat dan sisanya masih bergantung pada subsidi).
- d. Ada beberapa kementerian yang regulasinya menyebabkan BUMN Klaster Pangan untuk fokus bersaing dengan pihak swasta. Contohnya *raw sugar* dimana BUMN dan swasta memiliki hak impor gula yang sama tetapi BUMN memiliki kewajiban untuk membina petani. Harapannya, regulasi yang *previllage* (hak istimewa) bagi BUMN.
- e. Kementerian yang memiliki efek kepada BUMN Klaster Pangan adalah: KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Menko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian.
- f. Implementasi regulasi tersebut diharapkan dalam satu pintu.

### 3. PERUM BULOG

Stok di Gudang Perum Bulog lebih dari cukup, sehingga untuk penyerapan Perum Bulog meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI. Perum Bulog tidak mampu menyerap jika penyalurannya tidak diberikan ruang.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- a. Komisi IV DPR RI meminta untuk setiap kunjungan kerja **wajib** didampingi oleh Direksi mitra kerja.
- b. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan untuk memperbaiki kinerja dengan melibatkan kontribusi kepada masyarakat.
- c. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan yang mengajukan PMN agar jelas penggunaannya.
- d. Dibutuhkan koordinasi antara BUMN Klaster Pangan, Litbang Pertanian, dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal (*parent stock*).
- e. Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN Klaster Pangan untuk lebih jujur terhadap permasalahan di lapangan.
- f. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dan BUMN untuk segera memperbaiki lembaga usaha yang sakit dan hutang segera diselesaikan dengan mempertimbangkan konsep bisnis yang akan dijalankan.

- g. Komisi IV DPR RI meminta sinergitas antara Perum Bulog, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Pertanian terhadap tanaman anti stunting yang dapat diolah untuk mendukung program anti stunting.
- h. Komisi IV DPR RI meminta permasalahan Perum Bulog segera diselesaikan agar ketahanan pangan tidak mengkhawatirkan
- i. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan dan Perum Bulog untuk lebih terbuka terhadap permasalahan sehingga Komisi IV DPR RI dapat memberikan dukungan secara maksimal.
- j. Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog agar menjaga kualitas dan segera menyalurkan beras petani untuk mencegah disposal stok maupun penurunan mutu (contoh: Kebumen yang masih bermasalah dengan kutu).
- k. Daerah Kebumen, garam memiliki kualitas yang baik dan Komisi IV DPR RI meminta PT Garam untuk menganalisa garam di daerah Kebumen.
- l. BUMN Klaster Pangan: PT PPI sebaiknya tidak hanya berdagang, PT SHS dan PT Pertani harus aktif menangkap benih petani yang belum rilis.
- m. Petani tebu perlu diawasi dan ditinjau kepemilikan lahan yang mendapatkan pupuk bersubsidi (PT RNI dan PTPN  *Holding Company*).
- n. BUMN Klaster Pangan (Perum Perindo dan PT Perinus) sebaiknya menjual  *fish meal* ke koperasi kecil. Perum Perindo sesuai dengan UU harus mengutamakan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dibandingkan dengan ekspor.
- o. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pupuk Indonesia  *Holding Company* dan Kementerian Pertanian untuk menggerakkan BUMDes (yang berbentuk badan koperasi) akan dijadikan pengecer pupuk sehingga lebih terkontrol. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog bekerja sama dengan BUMDes (dengan mekanisme, BUMDes menjual gabah ke Perum Bulog jika harga di Perum Bulog lebih baik daripada pedagang atau penggiling padi). Sehingga Perum Bulog bisa menjadi perusahaan mandiri yang mampu menjual sembako masyarakat.
- p. Harapannya: BUMDes harus bisa menyediakan protein dan BUMN Klaster Pangan bertindak sebagai  *off taker*.

- q. Komisi IV DPR RI meminta mitra kerja untuk menindaklanjuti saran Anggota Komisi IV DPR RI.
- r. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan, PIHC, Perum Bulog, dan Pemerintah untuk mengadakan FGD untuk membahas terkait dengan BUMDes.

### III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja reses, seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh balai pembenihan dan budi daya ikan air tawar, di bawah laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan ambarawa (LPKIL) Dinas Provinsi Jawa Tengah, sehingga menghasilkan benih yang berkualitas unggul dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan bantuan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan oleh petani Kabupaten Temanggung, baik berupa pipanisasi, pupuk bersubsidi, maupun bantuan pengadaan bibit komoditas pertanian.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji terkait dengan potensi budi daya sapi perah di Kabupaten Temanggung.
4. Komisi IV DPR RI meminta untuk setiap kunjungan kerja **wajib** didampingi oleh Direksi mitra kerja.
5. Komisi IV DPR RI akan membahas tindak lanjut *pilot project* pemanfaatan BUMDes dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, Perum Bulog, dan BUMN Klaster Pangan.

#### IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja reses tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Tim,

Ttd.

**Drs. Hasan Aminudin, M.Si.**

A - 375

## LAMPIRAN MEDIA CETAK

### Kesejahteraan Petani Harus Mendapat Perhatian Serius

29-02-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengungkapkan, keberadaan para petani kopi dan bawang putih di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah banyak terancam dengan kehadiran pengusaha kaya yang sengaja menggeruk keuntungan berlipat tanpa memperhatikan kesejahteraan yang didapat para petani. Menurutnya, ke depannya hal ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup petani.

“Ya yang kita sayangkan adalah para petani-petani kaya ini mereka sengaja menggeruk hasil yang didapatkan, tanpa memperhatikan kesejahteraan petani yang sesungguhnya tentu ini yang menjadi bahaya,” imbuh Darori saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2020). Darori menambahkan, Kunker ke Temanggung ini guna melihat kesejahteraan dan hasil yang didapatkan para petani kopi dan bawang putih serta pembenihan budidaya ikan air.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi IV DPR RI terus berkomitmen untuk terus melindungi dan memperhatikan kesejahteraan para petani-petani yang sesungguhnya bukan para pengusaha-pengusaha pemilik lahan. “Kita dari Komisi IV terus berkomitmen untuk melindungi petani-petani sesungguhnya. Untuk itu kita bersama dengan pemerintah seperti Kementerian Pertanian dan para BUMN terkait terus mengupayakan ketersediaan bahan baku agar petani ini dapat terus menghasilkan panen yang terbaik,” komitmen Darori.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu menambahkan, dari hasil kunjungan ini, Komisi IV DPR RI menilai pembenihan budi daya ikan air yang di Temanggung sudah baik. Kemudian kita melihat petani kopi. Kita coba juga kopinya dan rasanya enak terutama jenis arabikanya tidak kalah dengan produksi luar. Sehingga ini harus didukung serta petani kopi ini harus dilindungi,” dukung mantan birokrat Kementerian Kehutanan itu.

**Sumber:**<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27968/t/Kesejahteraan+Petani+Harus+Mendapat+Perhatian+Serius>

#### Sumber lainnya:

1. <https://indopos.co.id/read/2020/03/01/223668/komisi-iv-dpr-ri-dukung-total-temanggung-jadi-sentra-terbesar-bawang-putih/>

2. <http://www.agrofarm.co.id/2020/03/21938/>
3. <https://www.wartaekonomi.co.id/read274495/dpr-ri-desak-bumn-pangan-berpihak-ke-petani>
4. <https://republika.co.id/berita/q6gk2s423/komisi-iv-dpr-dukung-temanggung-jadi-sentra-bawang-putih>
5. <https://indopos.co.id/read/2020/02/28/223445/terus-tekan-impor-kementan-dan-komisi-iv-dpr-ri-dorong-produksi-bawang-putih-temanggung/>
6. <https://indopos.co.id/read/2020/03/02/223830/dpr-ri-desak-bumn-pangan-berpihak-kepada-petani-dan-potensi-lokal/>
7. <https://bogordaily.net/2020/03/endang-setyawati-thohari-indonesia-harus-menjadi-lambung-pangan-dunia/>
8. <http://www.jurnas.com/artikel/68208/Komisi-IV-DPR-RI-Dukung-Temanggung-Jadi-Sentra-Terb Besar-Bawang-Putih/>
9. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/03/bumn-pangan-diharap-membantu-petani-dan-potensi-lokal>
10. <https://www.radarbangsa.com/news/23018/luluk-nur-hamidah-nilai-kebijakan-importir-wajib-tanam-bawang-5-tak-efektif>
11. <https://kanalindonesia.com/85370/2020/03/01/atasi-problem-ptpn-ix-ditjen-ppsk-kementan-gencar-kampanye-anti-alih-fungsi-lahan/>
12. <https://kkp.go.id/djpb/artikel/17872-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-kkp-kembangkan-benih-ikan-bermutu>
13. <https://www.jitunews.com/read/115716/kkp-kembangkan-benih-ikan-bermutu-dpr-beri-apresiasi>
14. <https://www.facebook.com/DPRRI/posts/2534377256663084>
15. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/11540-Diperlukan-Benih-Ikan-Berkualitas-untuk-Dorong-Produksi-Perikanan-Budidaya>

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### Gambar Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Pembenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar Ambarawa



### Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Temanggung



## Pertemuan Dengan Mitra Komisi IV DPR RI di Kantor PTPN IX

